

**IMPLEMENTASI PSAK 50 DAN PSAK 55 SEBELUM DAN SESUDAH KONVERGENSI
PENERAPAN IFRS SERTA DAMPAKNYA TERHADAP MANAJEMEN LABA PADA
INDUSTRI PERBANKAN**

**(Studi Empiris Pada Industri Perbankan yang Terdaftar di
Bursa Efek Indonesia (BEI) Tahun 2008-2015)**

¹Annisa Nurfitriana

STIE EKUITAS

¹nurfitriannisa09@gmail.com

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk memberikan gambaran dan bukti empirik tentang perbedaan implementasi PSAK 50 dan PSAK 55 sebelum dan sesudah konvergensi penerapan IFRS serta dampak yang ditimbulkan terhadap manajemen laba. Peneliti menggunakan metode deskriptif verifikatif untuk menggambarkan implementasi PSAK 50 dan PSAK 55 serta menggunakan alat uji statistik untuk melihat dampak yang dihasilkan dari variabel penelitian tersebut. Pengujian terhadap perbedaan implementasi PSAK 50 dan PSAK 55 sebelum dan sesudah konvergensi penerapan IFRS menggunakan *paired samples t test* sedangkan untuk menguji dampak yang dihasilkan terhadap manajemen laba menggunakan analisis regresi yang sebelumnya dilakukan uji asumsi klasik terlebih dahulu.

Hasil dari penelitian ini bahwa dalam PSAK 50 dan PSAK 55 data yang digunakan untuk menentukan nilai CKPN lebih objektif salah satunya berupa adanya data historis, estimasi arus kas masa depan dan transparansi data. Selain itu, PSAK 50 dan PSAK 55 setelah IFRS berdampak pula pada penurunan manajemen laba dimana T hitung yang diperoleh dari olah data diatas sebesar -0,356.

Kata kunci : PSAK 50, PSAK 55 dan manajemen laba

I. PENDAHULUAN

International Financial Reporting Standar (IFRS) merupakan standar yang diterapkan oleh perusahaan-perusahaan yang tersebar di berbagai negara di dunia. Standar ini diterbitkan oleh IASB (*International Accounting Standard Board*) yang berasal dari benua Eropa. Negara yang terlibat dalam perdagangan internasional menerapkan IFRS salah satunya adalah negara Indonesia. Indonesia merupakan salah satu negara yang mengadopsi IFRS ke dalam Standar Akuntansi Keuangannya. Standar Akuntansi Keuangan (SAK) ini digunakan oleh perusahaan-perusahaan yang *go public* dan *listing* di Bursa Efek Indonesia (BEI).

Keputusan penerapan SAK yang berbasis IFRS merupakan hasil perundingan Dewan Standar Akuntansi Keuangan Ikatan Akuntan Indonesia (DSAK IAI) yang menetapkan tiga tahapan konvergensi IFRS. Tahap pertama yaitu tahap adopsi pada tahun 2008-2010. Tahap kedua adalah tahap

persiapan akhir pada tahun 2011. Tahap ketiga adalah tahap implementasi yang dilaksanakan pada tahun 2012. Maka dari itu, IFRS diterapkan secara efektif per 1 Januari 2012.

Standar Akuntansi Keuangan merupakan standar akuntansi yang berlaku di Indonesia dan digunakan oleh perusahaan untuk menyusun, menyajikan dan melaporkan laporan keuangan. Dimana dalam SAK berbasis IFRS terdapat Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) yang merupakan bagian dari SAK untuk membahas dan mengatur secara lebih detail aturan tentang bagian dan proses penyusunan laporan keuangan. Salah satu PSAK yang berbasis IFRS adalah PSAK 50 dan PSAK 55. PSAK 50 membahas tentang penyajian instrumen keuangan dan PSAK 55 membahas tentang pengukuran dan pengakuan instrumen keuangan.

IFRS secara serentak diterapkan pada tahun 2012. Penerapan standar tersebut menjadi kesulitan tersendiri bagi industri yang ada di Indonesia. Salah satu industri yang terkena dampak dari penerapan PSAK 50 dan PSAK 55 setelah konvergensi IFRS adalah industri perbankan.

PSAK 50 dan PSAK 55 membahas tentang instrumen keuangan. PSAK 50 yang mengacu pada IAS 32 mengatur tentang penyajian sedangkan PSAK 55 yang mengacu pada IAS 39 mengatur tentang pengakuan dan pengukuran. Implikasi penerapan PSAK 50 dan PSAK 55 terhadap industri perbankan berkaitan dengan penentuan penyisihan Cadangan Kerugian Penurunan Nilai (Anggraita, Viska: 2012). Dewandharu dan Mulyani (2016) juga menyatakan bahwa perubahan signifikan PSAK 55 tentang pengakuan dan pengukuran pada industri perbankan terkait dengan penentuan cadangan kerugian penurunan nilai.

Permasalahan yang dialami oleh industri perbankan dalam konvergensi IFRS terutama pada *loan loss providing* (penyisihan kerugian kredit) atau Cadangan Kerugian Penurunan Nilai (CKPN). Permasalahan dalam CKPN timbul karena adanya perbedaan aturan antara peraturan perbankan dan SAK sebelum dilakukan revisi tahun 2006. Menurut Febrianti (2013) permasalahan yang timbul di industri perbankan diantaranya:

1) Penyisihan kerugian kredit yang diperkirakan tidak akan tertagih

Penentuan penyisihan kerugian kredit mengalami perbedaan antara standar lama dengan standar baru. Sebelum dilakukan revisi terhadap PSAK 50 dan PSAK 55 serta PAPI pada tahun 2008 penyisihan kerugian kredit ditentukan berdasarkan ekspektasi kerugian. Ekspektasi kerugian tersebut diasumsikan dengan besaran presentase kemungkinan jumlah kredit yang tidak akan tertagih. Sedangkan dengan diterapkannya standar baru, penyisihan kerugian kredit tersebut di dasarkan dengan bukti objektif. Bukti objektif yang digunakan dalam penentuan penyisihan kerugian kredit dapat didasarkan pada penggunaan data historis debitur sehingga lebih akurat dalam penentuan penyisihan kredit. Namun disamping itu, perolehan bukti-bukti objektif terkait debitur menjadi kesulitan tersendiri bagi industri perbankan. Sedangkan dengan diterapkannya ekspektasi kerugian sebagai dasar penentuan penyisihan kerugian kredit justru menjadi peluang bagi perbankan untuk melakukan penumpukkan cadangan dan merekayasa laporan keuangan untuk tujuan tertentu.

2) Perlunya penggunaan sistem yang sesuai untuk menyesuaikan dengan SAK baru
Dengan adanya penerapan standar yang baru, maka tidak menutup kemungkinan perbankan harus mempunyai sistem yang sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan yang berlaku. Maka dari itu, diperlukan sebuah sistem baru yang bisa memenuhi kebutuhan perbankan dalam menyusun laporan keuangannya sesuai dengan SAK yang baru. Namun, sistem baru tersebut membutuhkan biaya yang tidak sedikit.

3) Kurangnya penggunaan sumber daya manusia yang memahami penerapan PSAK 50 dan PSAK 55 yang berbasis IFRS serta peraturan perbankan.

Selain itu sumber daya manusia menjadi kendala tersendiri bagi industri perbankan. Penetapan standar baru dalam penentuan penyisihan kerugian kredit perlu dipahami oleh bagian yang menanganai hal tersebut. Maka dari itu kurangnya Sumber Daya Manusia yang memahami standar baru masih kurang.

Permasalahan diatas timbul karena adanya perbedaan aturan terkait pencadangan kredit yang di atur dalam PSAK sebelum penerapan IFRS berdasarkan ekspektasi dan diklasifikasikan berdasarkan kualitas kreditnya. Dalam peraturan tersebut dijelaskan bahwa penilaian pencadangan kreditnya didasarkan pada kualitas kredit yang ditetapkan menjadi lancar, dalam perhatian khusus, kurang lancar, diragukan atau macet.

Berbeda dengan pencadangan kredit yang diatur di dalam PSAK dimana di dalam PSAK yang berbasis IFRS lebih menekankan pada objektivitas dari bukti yang menjadi dasar pencadangan kredit tersebut. Maka dari itu, dibutuhkan suatu penyesuaian penggunaan standar PSAK sebelum IFRS dan setelah IFRS terkait pencadangan kredit dimana aset keuangan akan mengalami penurunan nilai. Namun sampai saat ini sumber daya manusia yang memahami sepenuhnya peraturan tersebut masih terbatas. Sehingga hal ini menjadi permasalahan tersendiri bagi industri perbankan.

Jika dilihat dari permasalahan tersebut, maka hal ini dapat dijadikan dasar bagi manajemen untuk melakukan kemungkinan terjadinya praktek manajemen laba yang dapat merugikan salah satu pihak akibat dari adanya kekurangan pemahaman terkait implementasi PSAK 50 dan PSAK 55 berbasis IFRS. Manajemen laba biasanya dilakukan oleh manajemen perusahaan dalam memenuhi kepentingan pribadinya dibandingkan dengan investor. Berdasarkan pada teori *agency* dimana terdapat perbedaan kepentingan antara *principal* dan *agent*. Dalam hal ini manajemen yang bertindak sebagai *principal* mempunyai kepentingan untuk meningkatkan nilai perusahaan dan perolehan bonus dari setiap kinerja perusahaannya sedangkan investor yang bertindak sebagai *agent* mengharapkan dividen dari saham yang diinvestasikan di perusahaan tersebut. Maka dari itu tidak menutup kemungkinan manajemen yang terjun langsung dan mengetahui semua kondisi perusahaan melakukan praktek manajemen laba agar kepentingan pribadinya tercapai. Kemungkinan besar terjadinya manajemen laba pada industri perbankan lebih besar karena adanya perubahan standar antara PSAK sebelum IFRS dan setelah IFRS terkait penyajian, pengakuan, pengukuran dan pengungkapan pada industri perbankan.

Penentuan CKPN berdasarkan aturan sebelum IFRS didasarkan pada ekspektasi kerugian. Data yang digunakan untuk menentukan jumlah cadangan penyisihan kerugian dari kredit yang diberikan tidak didasarkan dengan bukti nyata melainkan berdasarkan pertimbangan. Maka, tidak menutup kemungkinan manajemen dapat melakukan manajemen laba seperti diakuiinya cadangan kerugian penurunan nilai yang lebih besar di suatu periode tertentu untuk menurunkan laba perusahaan atau penyajian CKPN yang lebih rendah dengan tujuan untuk meningkatkan laba perusahaan. Berbeda dengan IFRS dalam menetapkan besaran CKPN. Penetapan CKPN didasarkan pada data historis yang ada bukan berdasarkan pertimbangan atau estimasi. Sehingga kemungkinan manajemen melakukan manajemen laba lebih kecil karena data penetapan CKPN berdasarkan data yang sudah terjadi.

Berdasarkan surat edaran No. 11/33/DPNP mengenai Pelaksanaan Pedoman Akuntansi Perbankan Indonesia, ditetapkan tentang jangka waktu pengumpulan data historis. Bank Indonesia memberikan waktu sampai tahun 2011 untuk melakukan pengumpulan data historis dalam penetapan CKPN berdasarkan IFRS. Hal ini dikarenakan per 1 Januari 2012 SAK berbasis IFRS sudah mulai diimplementasikan.

Berdasarkan pemaparan tersebut maka peneliti tertarik untuk meneliti tentang penerapan PSAK 50 dan PSAK 55 berbasis IFRS dan untuk mengetahui pengaruh penerapan PSAK tersebut terhadap manajemen laba pada industri perbankan. Maka dari itu, peneliti mengambil judul penelitian **“Implementasi PSAK 50 dan PSAK 55 Sebelum dan Sesudah Konvergensi Penerapan IFRS Serta Dampaknya Terhadap Manajemen Laba Pada Industri Perbankan (Studi Empiris Pada Industri Perbankan Yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) Tahun 2008-2015)”**.

II. KERANGKA TEORITIS DAN PENGEMBANGAN HIPOTESIS

PSAK 50

Penyeragaman pemahaman atas pelaporan keuangan dibutuhkan suatu standar yang sama. Standar Akuntansi Keuangan (SAK) yang berlaku di Indonesia telah mengadopsi IFRS. Salah satu PSAK yang telah berbasis IFRS adalah PSAK 50.

PSAK 50 mengadopsi IAS 32 tentang penyajian laporan keuangan. Tujuan PSAK 50 yaitu untuk menetapkan prinsip penyajian instrumen keuangan sebagai kewajiban atau ekuitas serta saling hapus aset keuangan dan liabilitas keuangan (SAK: 2015). Menurut SAK (2015) instrumen keuangan adalah setiap kontrak yang menambah nilai aset keuangan entitas dan kewajiban keuangan atau instrumen ekuitas entitas lain.

Dalam hal ini, industri perbankan juga terkena dampak dari adanya adopsi IFRS. Hal yang paling berpengaruh yaitu pengaturan tentang perlakuan atas suatu transaksi terutama yang berhubungan dengan.

Penyajian instrumen keuangan diakui pada saat awal penerbitan, dan diklasifikasikan sebagai liabilitas keuangan, aset keuangan atau instrumen ekuitas sesuai dengan substansi perjanjian kontraktual dan definisi liabilitas keuangan, aset keuangan dan instrumen ekuitas (SAK: 2015).

Seperti yang telah kita ketahui bahwa jika di dalam perbankan terdapat transaksi berupa kredit yang akan menimbulkan kerugian penurunan nilai dari setiap periodenya. PSAK 50 mengatur bahwa penyajian bunga, dividen, kerugian dan keuntungan yang dihasilkan dari instrumen keuangan diakui sebagai pendapatan atau beban dalam laporan laba rugi.

CKPN yang dihasilkan dari kredit yang diberikan kepada nasabah merupakan salah satu aset keuangan berbentuk hak kontraktual, dimana perbankan akan menerima kas atau aset keuangan lain dari entitas lain atas dana kredit yang diberikan. Paragraf 35 dalam PSAK 50 mengatur tentang penyajian CKPN yang merupakan salah satu kerugian yang harus dilaporkan di dalam laporan laba rugi sebagai beban yang akan mempengaruhi perolehan laba suatu entitas dalam suatu periode tertentu.

PSAK 55

Selain PSAK 50, PSAK 55 juga menerapkan standar akuntansi keuangan yang berbasis IFRS. PSAK 55 mengadopsi IAS 39 tentang pengakuan dan pengukuran instrumen keuangan. PSAK 55 bertujuan untuk mengatur tentang prinsip pengakuan dan pengukuran aset keuangan, liabilitas keuangan dan kontrak pembelian atau penjualan item non keuangan. Dalam penelitian ini pengakuan dan pengukuran instrumen keuangan akan lebih diarahkan ke kredit sebagai aset keuangan suatu entitas. Hal ini dikarenakan konvergensi IFRS berdampak pada industri perbankan yang berhubungan dengan kredit.

PSAK 55 (SAK: 2015) mengatur tentang pengakuan dan pengukuran instrumen keuangan. Instrumen keuangan diakui sebagai aset atau kewajiban jika sebuah entitas termasuk ke dalam salah satu pihak yang terkait dengan kontrak. Sedangkan pengukurannya terbagi menjadi beberapa jenis, yaitu :

- 1) Pengukuran awal berdasarkan nilai wajarnya, melalui laba rugi dengan ditambah biaya transaksi yang dapat diatribusikan langsung pada saat perolehan instrumen keuangan tersebut dan pada saat pertama kali tanggal transaksi jika entitas menggunakan akuntansi tanggal penyelesaian setelah pengakuan awal.
- 2) Pengukuran selanjutnya dilakukan setelah pengukuran awal dengan dibagi kedalam kategori aset keuangan yang diukur pada nilai wajar melalui laba rugi, investasi dimiliki hingga jatuh tempo, pinjaman yang diberikan atau piutang dan aset keuangan tersedia untuk dijual.

Penegasan aturan dalam menetapkan jumlah kerugian yang ditimbulkan dari penurunan nilai atau CKPN diatur dalam PSAK 50 paragraf 58 dimana ketika suatu entitas menentukan jumlah penurunan nilai yang ditimbulkan dari aset keuangan (kredit) harus disertai dengan bukti objektif. Berikut adalah beberapa kondisi yang dapat dijadikan bukti objektif bahwa aset keuangan mengalami penurunan nilai, yaitu:

- 1) Kesulitan keuangan signifikan yang dialami penerbit atau pihak peminjam
- 2) Pelanggaran kontrak

- 3) Pihak pemberi pinjaman, dengan alasan ekonomik atau huku sehubungan dengan kesulitan keuangan yang dialami pihak peminjam, memberikan keringanan pada pihak peminjam
- 4) Adanya kemungkinan pihak peminjam mengalami pailit
- 5) Hilangnya pasar aktif dari aset keuangan akibat kesulitan keuangan
- 6) Data yang diobservasi mengindikasikan adanya penurunan yang dapat diukur atas estimasi arus kas masa depan dari kelompok aset keuangan.

Manajemen Laba

Definisi Manajemen Laba

Manajemen laba adalah proses dimana manajer memiliki kemampuan untuk menggunakan diskresi yang mereka miliki untuk menyesatkan *stakeholders* atau mempengaruhi hasil kontraktual mereka dengan *owner* Healy dan Wahlen (1999) dalam Kanagaretnam (2004). Selain itu Schipper dalam Rahmawati (2006) mendefinisikan bahwa manajemen laba adalah suatu intervensi yang dilakukan secara sengaja oleh pihak eksternal kepada pihak internal dalam pelaporan keuangan untuk kepentingan pribadinya.

Faktor-Faktor Pendorong Manajemen Laba

Manajemen laba tidak akan terjadi jika tidak ada faktor-faktor pendorong bagi pihak-pihak tertentu melakukan manajemen laba. Menurut Watt dan Zimmerman (1986) dalam Rahmawati (2006) menyatakan bahwa terdapat tiga hipotesis yang menjadi pendorong seseorang melakukan manajemen laba. Faktor-faktor pendorong manajemen laba adalah sebagai berikut:

- 1) *Bonus plan hypothesis*, dilakukan agar manajemen memperoleh bonus yang tinggi dari pencapaian tujuan yang ditetapkan oleh perusahaan di awal tahun anggaran.
- 2) *Debt covenant hypothesis*, dilakukan agar pelunasan yang sudah disepakati diawal dapat ditunda.
- 3) *Political cost hypothesis*, berhubungan dengan kebijakan pemerintah salah satu manajemen laba yang biasanya dilakukan agar pembayaran pajak ke pemerintah rendah.

Kebijakan akuntansi yang digunakan oleh manajemen untuk tujuan tersebut salah satunya adalah terkait kebijakan pengakuan CKPN. Pada saat perolehan laba menurun, untuk meningkatkan laba manajemen menurunkan beban CKPN. Dengan demikian, laba yang dilaporkan meningkat dan manajemen memperoleh bonus dari pencapaian laba yang meningkat.

Implementasi PSAK 50 dan PSAK 55 Sebelum dan Sesudah Konvergensi IFRS

Sejak tahun 2012 Indonesia telah mulai mengimplementasikan IFRS secara penuh. Hal tersebut dimaksudkan agar standar akuntansi yang digunakan di Indonesia menggunakan standar yang diakui di internasional. Maka dari itu, adanya konvergensi IFRS memaksa semua entitas untuk mengimplementasikan standar akuntansi keuangan berbasis IFRS.

Salah satu PSAK yang mengadopsi IFRS yaitu PSAK 50 dengan mengadopsi IAS 32 dan PSAK 55 dengan mengadopsi IAS 39. Adanya perubahan basis standar akuntansi keuangan memungkinkan adanya perbedaan dalam implementasi PSAK tersebut.

Hasil penelitian yang dilakukan oleh Budiarti dan Sularto (2013) tentang implementasi PSAK 50 dan PSAK 55 yang menyatakan bahwa terdapat perbedaan dalam implementasi PSAK 50 dan PSAK 55 sebelum dan sesudah konvergensi IFRS.

Dampak Implementasi PSAK 50 dan PSAK 55 Terhadap Manajemen Laba

Adanya konvergensi IFRS salah satunya berdampak pada industri perbankan. Implikasi dari penerapan IFRS terhadap industri perbankan yaitu dalam penentuan CKPN. Standar yang sudah ada mengatur penetapan CKPN berdasarkan kualitas kreditnya, sedangkan IFRS yang lebih menekankan pada objektivitas dan transparansi.

Akibat dari adanya perubahan standar, hal tersebut menimbulkan berbagai macam permasalahan. Masalah yang timbul bisa bersumber dari sistem, sumber daya manusia, penyesuaian karakter industri perbankan di Indonesia dengan standar IFRS dan lain sebagainya. Jika kita melihat dari timbulnya masalah tersebut, tidak menutup kemungkinan kondisi seperti itu digunakan oleh oknum tertentu untuk melakukan manajemen laba yang dapat menguntungkan salah satu pihak dan merugikan pihak lain.

Hasil penelitian yang dilakukan oleh Anggraita, Viska (2012) menyatakan bahwa manajemen laba mengalami penurunan setelah adopsi PSAK 50 dan PSAK 55 (revisi 2006) dengan penentuan CKPN berdasarkan bukti objektivitas. Dewandharu dan Mulyani, Sri (2016) juga menyatakan bahwa dampak dari implementasi PSAK 50 dan PSAK 55 (revisi 2006) akan menurunkan manajemen laba di industri perbankan melalui CKPN.

Hipotesis

Dari pemaparan kerangka berfikir, maka hipotesis dari penelitian ini, yaitu:

H₁: Terdapat perbedaan implementasi PSAK 50 dan PSAK 55 sebelum dan sesudah konvergensi IFRS.

H₂: Implementasi PSAK 50 dan PSAK 55 berdampak pada penurunan manajemen laba

III. METODE PENELITIAN

Populasi dan Sampel

Populasi dari penelitian ini adalah industri perbankan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia dari tahun 2008-2015. Jumlah populasi sebanyak 43 bank. Bank yang sudah terdaftar di BEI tidak semua diteliti oleh peneliti. Maka dari itu, peneliti mengambil beberapa bank yang dijadikan sampel dalam penelitian ini.

Teknik pengambilan sampel menggunakan *probability*, dimana semua perusahaan memperoleh kesempatan yang sama untuk dijadikan sampel. Sedangkan cara untuk menentukan bank mana saja yang

akan dijadikan sampel, peneliti menggunakan rumus Slovin. Rumus Slovin (Husein: 2005) adalah sebagai berikut:

$$n = \frac{N}{1 + N(e)^2}$$

Keterangan :

n = ukuran sampel

N = populasi

e = derajat kesalahan yang masih dalam batas toleransi, penelitian ini menggunakan 5%.

Berdasarkan rumus tersebut, maka jumlah bank yang dijadikan sampel adalah sebanyak 39 bank.

$$\begin{aligned} n &= \frac{43}{1 + 43(0,05)^2} \\ &= 39 \text{ (pembulatan)} \end{aligned}$$

Metode Pengumpulan data

Jenis dari penelitian ini adalah penelitian kuantitatif dengan menggunakan sumber data yang sudah ada dan alat statistik untuk mengujinya. Metode penelitian yang digunakan adalah metode deskriptif verifikatif. Metode deskriptif verifikatif digunakan untuk menggambarkan dan menjelaskan hubungan variabel yang dijadikan objek penelitian. Metode tersebut sesuai dengan tujuan dari penelitian peneliti.

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan data sekunder yang diperoleh dari *website* Bursa Efek Indonesia. Untuk mendukung tujuan penelitian, peneliti menggunakan teknik pengumpulan data dengan menggunakan metode pustaka. Data yang terkumpul diperoleh dari berbagai sumber referensi baik berupa buku, jurnal, standar, *website* dan lain-lain.

Operasional Variabel

Penelitian ini terdiri dari variabel independen dan variabel dependen. Variabel independen dari penelitian ini adalah PSAK 50 dan PSAK 55. Untuk mengukur implementasi PSAK 50 dan PSAK 55, peneliti menggunakan variabel *dummy*. Jika bank telah menerapkan PSAK 50 dan PSAK 55 berbasis IFRS maka pengukurannya bernilai satu (1) dan bagi bank yang belum menerapkan PSAK 50 dan PSAK 55 berbasis IFRS maka pengukurannya bernilai nol (0)

Variabel dependen dari penelitian ini adalah manajemen laba. Pengukuran manajemen laba menggunakan *discretionary accrual* dengan model Beaver and Engel (1996) dalam Dewandharu dan Mulyani (2016):

$$NDA_{it} = \beta_0 + \beta_1 LCO_{it} + \beta_2 LOAN_{it} + \beta_3 NPL_{it} + \beta_4 \Delta NPL_{it+1} + \text{zit}$$

Dimana :

LCO_{it} : *Loan Charge Offs* (kredit yang dihapusbukukan)

$LOAN_{it}$: *Loan Outstanding* (kredit yang beredar)

NPL_{it} : *Non Performing Loan* (kredit bermasalah)

ΔNPL_{it+1} : Selisih NPL_{t+1} dengan NPL_t

Definisi dari total acrual dalam model penelitian ini terdiri dari *non discretionary acrual* (NDA) dan *discretionary acrual* (DA). Maka dari itu, rumusan dalam penentuan *discretionary acrual* yaitu sebagai berikut:

$$TA_{it} = NDA_{it} - DA_{it}$$
$$TA_{it} = \beta_0 + \beta_1 LCO_{it} + \beta_2 LOAN_{it} + \beta_3 NPL_{it} + \beta_4 \Delta NPL_{it+1} + zit$$

Rancangan Pengujian Hipotesis

Jika data yang akan kita uji sudah lolos uji asumsi klasik, langkah selanjutnya adalah melakukan pengujian dengan menggunakan analisis regresi linier berganda.

Analisis regresi linier digunakan untuk mengetahui besarnya pengaruh hubungan yang terjadi antara variabel independen dan variabel dependen (Sunyoto: 2013).

Rumusan regresi linier berganda yaitu:

$$Y = a + b(x) + c(x) + \dots + \varepsilon$$

Uji F

Uji F digunakan untuk menentukan hasil koefisien regresi secara bersamaan. Pengujian dilakukan dengan menggunakan tingkat signifikansi 0,05 dan 2 sisi. Jika signifikansi < 0,05, maka H_0 ditolak, dan jika signifikansi > 0,05 maka H_0 diterima.

Paired Samples T Test (Uji T untuk Sampel Berpasangan)

Uji t untuk sampel berpasangan bertujuan untuk menguji perbedaan harga dua mean khusus data saling berpasangan, sehingga konsekuensinya banyaknya data kedua sampel penelitian harus sama (Sunyoto, 2013).

Apabila pengujian tersebut telah dilakukan, maka hasil pengujian tersebut t hitung dibandingkan dengan t table dengan kriteria sebagai berikut:

1. Untuk t hitung positif
 - a. Jika t hitung \geq t table, maka H_0 ditolak dan H_1 diterima.
 - b. Jika t hitung \leq t table, maka H_0 diterima dan H_1 ditolak.
2. Untuk t hitung negatif
 - a. Jika t hitung < t table, maka H_0 ditolak.
 - b. Jika t hitung \geq t table, maka H_0 diterima.

IV. PEMBAHASAN

Hasil Penelitian

Implementasi PSAK 50 dan PSAK 55 Sebelum dan Sesudah Konvergensi IFRS pada Industri Perbankan

PSAK 50 dan PSAK 55 merupakan standar yang diterapkan oleh industri perbankan untuk menyajikan, mengukur dan mengakui transaksi yang terjadi di perbankan. Salah satu hal yang diatur dalam PSAK 50 dan PSAK 55 berhubungan dengan Cadangan Kerugian Penurunan Nilai. Seperti yang telah kita ketahui bahwa IFRS mulai efektif diimplementasikan di Indonesia sejak 1 Januari 2012. Berdasarkan penelitian yang dilakukan, berikut adalah data perbankan yang menerapkan PSAK 50 dan PSAK 55 sesudah implementasi IFRS:

Tabel 1
Hasil Uji Implementasi PSAK 50 dan PSAK 55

Keterangan	Frekuensi	Persentase
Sudah Menerapkan	39	59%
Belum Menerapkan	27	41%
	66	100%

Berdasarkan hasil uji tersebut dari jumlah sampel perbankan sebesar 39 bank, sebesar 59% perbankan sudah menerapkan PSAK 50 dan PSAK 55. Sedangkan sebesar 41% bank belum menerapkan PSAK 50 dan PSAK 55 pasca implementasi IFRS.

Dampak Implementasi PSAK 50 dan PSAK 55 pada Manajemen Laba Sebelum dan Sesudah Konvergensi IFRS

Penelitian selanjutnya dilakukan untuk mengetahui dampak yang ditimbulkan dari adanya perubahan standar akuntansi yang sebelumnya menggunakan standar GAAP berubah menjadi IFRS. Uji yang digunakan untuk mengetahui perbedaan implementasi PSAK 50 dan PSAK 55 di industri perbankan sebelum dan sesudah IFRS yaitu uji t sampel berpasangan (*Paired Sample Test*). Berikut adalah hasil uji yang dilakukan:

Tabel 2
Output Hasil Paired Sample Correlations
Paired Samples Correlations

	N	Correlation	Sig.
Pair 1 Sebelum_Diterapkan_IFRS & Sesudah_Diterapkan_IFRS	8	.076	.928

(Sumber: *Output SPSS versi 20*)

Berdasarkan olah data diatas nilai korelasi sebesar 0,076 menggambarkan bahwa implementasi PSAK 50 dan PSAK 55 sebelum dan sesudah IFRS memiliki hubungan yang sangat rendah. Hal ini didasarkan pada interval 0,000-0,199. Sedangkan untuk mengetahui implementai PSAK 50 dan PSAK 55 mengalami perbedaan atau tidak dijelaskan pada tabel berikut.

Tabel 3
Output Hasil Paired Sample Test
Paired Samples Test

		Pair 1	
		Sebelum diterapkannya IFRS -	Sesudah diterapkannya IFRS
Paired Different	Mean		-0.080
	Std. Deviation		0.423
	Std. Error Mean		0.272
	95% Confidence Interval	Lower	-0.780
	of The Difference	Upper	-0.751
T			-0.356
Df			7
Sig. (2 tailed)			0.800

(Sumber: Output SPSS versi 20)

T tabel dapat dilihat pada tabel statistik pada signifikansi $0,05:2=0,025$ (uji 2 sisi) dengan derajat kebebasan (df) $n-1$ atau $8-1=7$, hasil yang diperoleh untuk t tabel sebesar $3,182/-3,182$. T hitung yang diperoleh dari olah data diatas sebesar $-0,356$. Nilai $-t$ hitung $< -t$ tabel ($-0,356 > -3,182$) maka H_0 diterima.

Pembahasan

Implementasi PSAK 50 dan PSAK 55 Sebelum dan Sesudah konvergensi IFRS pada Industri Perbankan

Berdasarkan hasil penelitian yang dipaparkan diatas, dapat diketahui bahwa hampir setengah dari total perbankan sudah menerapkan PSAK 50 dan PSAK 55. Perbankan yang terdaftar di BEI pada dasarnya telah mengikuti aturan yang berlaku. Seperti yang telah kita ketahui bahwa standar akuntansi di Indonesia seringkali mengalami revisi. Revisi mendasar yang berkaitan dengan PSAK 50 dan PSAK terkait CKPN diatur pada PSAK 50 dan PSAK 55 revisi 2006. Dimana perbankan menggunakan data yang lebih objektif salah satunya berupa data historis dan arus kas masa depan. Maka dari itu, implementasi PSAK 50 dan PSAK 55 sebelum dan sesudah IFRS tidak terlalu mengalami perbedaan yang cukup signifikan. Hal ini dikarenakan tujuan dari diterapkan IFRS agar data laporan keuangan

lebih transparan. Hal tersebut sejalan dengan aturan yang sudah diterapkan sejak tahun 2006 dalam penetapan CKPN didasarkan pada data yang lebih transparan.

PSAK 50 mengatur penyajian dan pengidentifikasian informasi yang harus diungkapkan. Hal ini terkait dengan suku bunga, dividen, keuntungan dan kerugian. Jika dihubungkan dengan industri perbankan hal tersebut berhubungan dengan suku bunga yang dihasilkan dari kredit, dan keuntungan serta kerugian yang didasarkan pada perubahan nilai aset keuangan. Informasi yang diungkapkan meliputi informasi mengenai faktor yang mempengaruhi waktu dan tingkat kepastian arus kas masa depan.

PSAK 55 mengatur tentang pengakuan dan pengukuran terkait dengan aset keuangan, kewajiban keuangan dan kontrak pembelian dan penjualan item non keuangan dengan memberikan definisi dan karakteristik terhadap kategori. Dalam PSAK 55 berkaitan dengan jatuh tempo pelunasan kredit sehingga berpengaruh terhadap CKPN.

Dampak Implementasi PSAK 50 dan PSAK 55 pada Manajemen Laba Sebelum dan Sesudah Konvergensi IFRS

Berdasarkan hasil penelitian yang dipaparkan sebelumnya, T hitung yang diperoleh dari olah data sebesar $-0,356$. Nilai $-t$ hitung $< -t$ tabel ($-0,356 > -3,182$) maka H_0 diterima. Dimana terdapat perbedaan antara implementasi PSAK 50 dan PSAK 55 pada manajemen laba sebelum dan sesudah konvergensi IFRS.

Data dan informasi yang dibutuhkan oleh perbankan dalam menentukan nilai CKPN dan kategori kredit lebih rinci setelah implementasi IFRS. Hal ini dikarenakan dalam IFRS lebih menekankan pada objektivitas bukti data yang menyatakan bahwa debitur mengalami penurunan nilai sehingga akan berpengaruh dalam penentuan nilai CKPN oleh perbankan dan manajemen laba yang terjadi di perbankan akan mengalami penurunan karena lengkap dan objektifnya data yang diperoleh. Sedangkan jika perbankan masih menggunakan ekspektasi dalam menentukan penurunan nilai dari nilai kredit debitur, hal tersebut dapat mengurangi objektivitas nilai CKPN itu sendiri. Semakin lengkap informasi yang diperoleh dan diungkapkan maka manajemen laba akan mengalami penurunan.

Maka dari itu, dengan diterapkannya PSAK 50 dan PSAK 55 setelah IFRS berdampak pada penurunan manajemen laba. Peneliti yang mendukung penelitian ini, yaitu Anggraita, Viska (2012); Budiarti, Age Estri dan Sularto, Lana. (2013) dan Dewandharu, Bagus Adi dan Mulyani, Sri. (2016).

V. KESIMPULAN

Berdasarkan penelitian yang dilakukan peneliti, maka kesimpulan penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Dalam PSAK 50 dan PSAK 55 data yang digunakan untuk menentukan nilai CKPN lebih objektif salah satunya berupa adanya data historis, estimasi arus kas masa depan dan transparansi data.

2. PSAK 50 dan PSAK 55 setelah IFRS berdampak pada penurunan manajemen laba. Peneliti yang mendukung penelitian ini, yaitu Anggraita, Viska (2012); Budiarti, Age Estri dan Sularto, Lana. (2013) dan Dewandharu, Bagus Adi dan Mulyani, Sri. (2016).

VI. DAFTAR REFERENSI

- Anggraita, Viska. 2012. Dampak Penerapan PSAK 50/55 (revisi 2006) terhadap Manajemen Laba di Perbankan: Peranan Mekanisme Corporate Governance, Struktur kepemilikan, dan Kualitas Audit. Simposium Nasional Akuntansi 15 Banjarmasin.
- Budiarti, Age Estri dan Sularto, Lana. 2013. Implementasi PSAK 50 dan 55 Sebelum dan Sesudah Konvergensi IFRS IAS 32 dan 39 Serta Dampaknya Terhadap Laba dan Harga Saham Pada Industri Perbankan. *Proceeding PESAT*, Vol. 5 Oktober 2013 ISSN: 1858-2559.
- Dewandharu, Bagus Adi dan Mulyani, Sri. 2016. Dampak Penerapan PSAK 55 (revisi 2006) Atas Penyisihan Kerugian Kredit Terhadap Praktik Manajemen Laba. Simposium Nasional Akuntansi XIX, Lampung 2016.
- Febrianti, Ekaputri C. 2013. Analisis Penerapan PSAK 55 Atas Cadangan Kerugian Penurunan Nilai. *Jurnal EMBA*, Vol. 1, No. 3, hal. 207-217.
- Husein Umar. 2005. *Metodologi Penelitian untuk Bisnis*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Ikatan Akuntan Indonesia. 2015. Standar Akuntansi Keuangan. Jakarta: IAI.
- Jensen, Michael C and Meckling, William H. 1976. Theory of The Firm: Managerial Behavior, Agency Costs and Ownership Structure. *Journal of Financial Economic*, Vol. 3 No. 4, pp 305-360.
- Kanagaretnam, K. et al. 2004. Earnings Management to Reduce Earnings Variability: Evidence from Bank Loan Loss Provisions. *Review of Accounting & Finance*, Vol. 3, No. 1, pp 128-148.
- Priyatno, Duwi. 2012. *Cara Kilat Belajar Analisa Data dengan SPSS 20*. Yogyakarta: Andi Publisher.
- Pulumbara, Deisye C., Sondakh, Jullie J, dan Wangkar, Anneke. 2014. Analisis Penerapan PSAK 50: Penyajian dan PSAK 55: Pengakuan dan Pengungkapan Atas Cadangan Kerugian Penurunan Nilai Pada PT. Bank Central Asia (Persero) Tbk. *Jurnal EMBA*, Vol. 2 No. 3 September 2014, Hal. 1350-1358.

Rahmawati dkk. 2006. Pengaruh Asimetri Informasi Terhadap Praktik Manajemen Laba Pada Perusahaan Perbankan Publik yang Terdaftar di Bursa Efek Jakarta. Simposium Nasional Akuntansi 9 Padang.

Sunyoto, Danang. 2013. *Metodologi Penelitian Akuntansi*. Bandung: PT. Refika Aditama.

Tim Penyusun Pedoman Akuntansi Perbankan Indonesia. 2009. Surat Edaran Bank Indonesia No 11/33/DPNP tentang Pelaksanaan Pedoman Akuntansi Perbankan Indonesia